

# ISU PEMEKARAN WILAYAH SEBAGAI KOMODITAS POLITIK DALAM MASYARAKAT TO PULO DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dwi Indriani

Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: [dwiindriani631@gmail.com](mailto:dwiindriani631@gmail.com)

---

## Abstract

*The decentralization of local government administration has been expected to be able to promote the socio-economic prosperity of community. One of the opportunities that can be done is by establishing a new autonomous region through redistricting. By provoking the issue of redistricting, local elites then brought this issue to be a political commodity to expand their political popularity and increase their electability. This article aims to 1) identify the factors behind the demands for the establishing a new autonomous region by redistricting certain islands of the Kepulauan Selayar Regency; 2) describe the role of elites in the effort to expand the Regency of Kepulauan Selayar; and 3) analyze the current dynamics regarding the issue of the territorial redistricting of the Kepulauan Selayar Regency. By using a qualitative approach, it is found that geographical circumstances, socioeconomic inequality of local indigenous people and differences of identity are among the factors exist behind the demand to establishing a new autonomous territory. It is also found that local elites played a significant role behind the redistricting agenda for some reason, particularly to sustain their power and authority. However, the new territory is unable to be established, but the issue is remaind articulated.*

*Keywords: redistricting; decentralization; elite; uneven development; Selayar.*

---

## Abstrak

Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu mendorong kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu peluang yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran. Dengan memprovokasi isu pemekaran, elit lokal kemudian menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk memperluas popularitas politik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Tulisan ini memiliki tujuan untuk 1) menemukan faktor yang melatarbelakangi tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan meredistribusi pulau-pulau tertentu di Kabupaten Kepulauan Selayar; 2) mendeskripsikan peran elit politik dalam upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) menganalisis dinamika terkini terkait isu pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keadaan geografis, ketimpangan sosial ekonomi masyarakat adat setempat dan perbedaan identitas menjadi salah satu faktor yang mendorong tuntutan pembentukan wilayah otonom baru. Dalam kasus ini juga ditemukan bahwa elit lokal memainkan peran penting di balik agenda pemekaran karena alasan tertentu, terutama untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas mereka. Namun, sampai sekarang rencana pemekaran tidak kunjung terealisasi, tetapi masalah tersebut tetap bergulir dan diperbincangkan di kalangan elit-elit lokal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

*Kata kunci: pemekaran wilayah; desentralisasi; elite; ketimpangan pembangunan; Selayar.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegagalan sentralisasi dalam mengatasi krisis multidimensi yang mendera pada tahun 1997 telah membuat kehancuran secara masif pada beberapa tatanan perekonomian Indonesia. Akibat dari krisis tersebut telah menggiring kehidupan sosial ekonomi Indonesia pada derajat yang sangat rendah. Sistem politik yang dijalankan dirasakan sangat otoriter, sehingga konsentrasi sumber daya telah dieksploitasi serta dikuasai sepenuhnya oleh kroni pada pemerintah pusat. Hal ini tidak terlepas oleh kewenangan yang sentralistik tanpa adanya upaya untuk mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah.

Lahirnya kebijakan desentralisasi melalui penetapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu menjadi titik terang dari permasalahan lokal bangsa Indonesia. Secara teoritikal, menurut Edmonds (2001:18) desentralisasi ialah “... *the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organization, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organization, local government, or non-governmental organization.*”

Peralihan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia telah memunculkan sebuah kebijakan yang memberi keleluasaan bagi suatu daerah untuk mengelolah rumah tangganya sendiri yang disebut sebagai otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6, otonomi daerah adalah:

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi sendiri memiliki tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian yang diamanatkan dalam otonomi daerah ialah aturan mengenai kemungkinan dilakukannya pemekaran daerah (*redistricting*). Pemekaran daerah (*redistricting*) secara umum diartikan sebagai pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dari wilayah induk. Pemekaran daerah merupakan bentuk usaha

pemerintah dalam mewujudkan pembagian dan pemerataan wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif maupun dalam bentuk pengeksploitasian sumber daya dalam daerah tersebut (Jeddawi, 2009: 87). Oleh karena itu, pemerintah melembarkan PP No. 78/2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagai syarat kelayakan pengajuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pada dasarnya, pemekaran daerah merupakan tindakan yang baik jika dalam konsep awal otonomi daerah yang diterapkan, bertujuan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Namun realitas yang terjadi di Indonesia kebanyakan malah berbanding terbalik, pemekaran daerah hanya akan menguntungkan beberapa golongan dan kelompok tertentu. Siti Zuhro (2013: 27) mengatakan bahwa, pemekaran daerah masih sering dijadikan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum oleh para elit dan politisi. Janji pemekaran sering dijadikan sebagai alat politik yang bersifat kepentingan sementara, tanpa mengikuti kriteria pemekaran yang benar.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Isu pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu contoh implikasi dari proses demokratisasi pasca Orde Baru. Tuntutan pemekaran kabupaten ini muncul dari aspirasi masyarakat To Pulo di Kabupaten Kepulauan Selayar. Isu pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar telah memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan isu pemekaran ini mengalami pasang surut dan hanya kembali eksis sebagai isu hangat dalam kontestasi politik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hampir 20 tahun sejak dicanangkannya rencana pemekaran ini sampai sekarang belum terealisasi. Padahal, berbagai upaya dan peran dari beberapa elit politik sudah terlihat dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Takabonerate. Pemekaran daerah menjadi isu yang tidak kalah penting untuk dikaji sebagai implikasi dari lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini disebabkan, pemekaran dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat juga mampu menuai konflik-konflik politik di daerah pemekaran. Oleh

karena itu, penulis tertarik dalam meneliti 1) Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar?; 2) Bagaimanakah peran para elit politik dalam upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar?; 3) Bagaimana dinamika rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar belum berhasil hingga saat ini?

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelumnya, konteks penelitian tersebut terkait banyaknya tuntutan pemekaran di Indonesia yang ternyata dilatarbelakangi bukan atas dasar kepentingan masyarakat, namun banyak dijadikan sebuah alat politik oleh elit-elit tertentu. Penelitian Aprillia yang berjudul Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal, mengatakan bahwa Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff. 2010. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: *Local Strongmen dan Roving Bandits* menjelaskan bahwa lahirnya sistem desentralisasi di Indonesia menyebabkan peralihan *Stationary bandit ke roving bandits* dan memunculkan elit politik lokal yang mengeksploitasi sumberdaya di ranah lokal yang disebut *local strongmen*.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelum-sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil permasalahan atau isu yang sangat menarik yaitu tentang pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki karakteristik tersendiri yang

membedakan dengan isu pemekaran lain di Indonesia. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu teori elit dan teori stationary bandits and roving bandits.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar; 2) Peran para elit politik dalam upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) Dinamika rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar belum berhasil hingga saat ini.

## **II. METODOLOGI**

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif menuntut penulis untuk memiliki keterampilan menganalisis dan memahami permasalahan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dianggap relevan dalam konteks penelitian ini karena penelitian kualitatif dapat mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang relevan, lebih mendalam, lengkap, kredibel, dan bermakna dalam penyusunan laporan akhir yang berjudul “Isu Pemekaran Wilayah sebagai Komoditas Politik dalam Masyarakat To Pulo di Kabupaten Kepulauan Selayar”, penulis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016:4-5) adalah:

Metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2016), terdapat beberapa rancangan penelitian dan dalam penelitian kali ini jenis rancangan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus (*case study*). Adapun alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karna analisis pada sebuah

kasus akan lebih mendalam dan lebih spesifik.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah menganalisis jawaban informan. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007:246) analisis data terdiri dari tiga alur yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-Faktor yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan pemekaran**

##### *a) Kondisi geografis yang luas*

Persoalan rentang Kendali merupakan salah satu hal yang menjadi alasan adanya tuntutan pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara geografis, wilayah kabupaten kepulauan selayar terdiri dari pulau-pulau dengan jumlah kecamatan 11 kecamatan, lima diantaranya adalah kecamatan yang berada di kepulauan. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak H.Dg Mangitung salah satu politisi yang merupakan pihak terkait dalam isu pemekaran pada 6 januari 2021 menjelaskan bahwa:

Jarak tempuh masyarakat yang berada di wilayah 5 kecamatan kepulauan dalam mengakses pelayanan publik di ibukota kabupaten sangatlah jauh dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga pengecilan rentang kendali melalui usulan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru harus dilakukan demi akses pelayanan masyarakat yang dapat berjalan dengan baik.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, bapak Ir. H. Ady Ansar,S.Hut.,MMPub,IPM dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Januari 2021

Secara pribadi saya sangat mendukung rencana pemekaran lima

kecamatan kepulauan dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kalau kita melihat rentang kendali atau jarak dari ibukota kabupaten itu sangat jauh dan butuh waktu sehari-hari untuk bisa sampai ke ibukota kabupaten. Sehingga fungsi pemerintahan, baik dari pelayanan, pemberdayaan, maupun pengawasan tidak bisa dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari kondisi di wilayah kepulauan yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih di beberapa pulau khususnya di Kecamatan Taka Bonerate dan Passilambena.

*b) Keinginan untuk peningkatan derajat sosial ekonomi di wilayah kepulauan*

Kabupaten Kepulauan Takabonerate merupakan nama kabupaten yang akan diusulkan dalam rencana pemekaran pada lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Daerah ini akan dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya dan diyakini akan lebih maju dibandingkan daerah induknya. Diantara potensi-potensi yang akan digali dari Kabupaten Kepulauan Takabonerate, khususnya pada sektor industri perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Selain itu, yang menjadi pertimbangan lahirnya tuntutan pemekaran ini ialah banyaknya lulusan perguruan tinggi atau sarjana di daerah kepulauan. Namun minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah kepulauan membuat hal tersebut menyumbang angka pengangguran yang sangat tinggi di daerah kepulauan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak baik yang pro maupun kontra terhadap isu pembentukan Kabupaten Kepulauan Takabonerate di Kabupaten Kepulauan Selayar, kedua pihak meyakini bahwa pembentukan daerah otonom baru akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor khususnya distribusi kekuasaan di bidang pemerintahan.

*c) Perbedaan Identitas*

Perbedaan identitas dengan adanya kategorisasi antara “To Pulo dan To Daratan.” juga menjadi salah satu alasan munculnya tuntutan pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun, perbedaan identitas antara To Pulo dan To Daratan bukanlah kategorisasi etnis, melainkan kumpulan

etnis/suku yang diplot ke dalam identitas berdasarkan kondisi geografisnya (Abu Bakar, 2015), dimana To pulo adalah sebutan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lima kecamatan kepulauan sedangkan To daratan merupakan julukan bagi masyarakat yang tinggal di daratan utama selayar (pulau besar).

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar (HPMKS) pada tanggal 7 Januari 2021 menjelaskan bahwa

Memang benar bahwa salah satu yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah adanya diskriminasi antara masyarakat To Pulo dengan To Daratan. Pada masa Orde Baru To Pulo adalah kelompok marjinal dengan segala keterbatasan pada akses pendidikan. Sumberdaya manusia yang lemah dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini terjadi karena kurangnya To Pulo yang memegang posisi penting ditingkat kabupaten yang berperan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga banyak anggaran pembangunan di wilayah kepulauan kurang teralokasikan dengan baik. Kategorisasi ini sering sekali nampak ketika To Pulo dan To Daratan bertemu dalam suatu arena kontestasi apapun seperti contoh kecilnya pertandingan sepak bola dan bahkan dalam ranah persaingan jabatan di organisasi daerah yaitu Gerakan Mahasiswa Pelajar Tanadoang (GEMPITA)

*d) Motif pemburu rente dari para elit*

Dari analisis *The Jawa Post Institute of Pro Otonomi* (2008) pemekaran daerah tidak lagi didasarkan pada peningkatan pelayanan publik. Selama ini yang mengusulkan pemekaran daerah adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan pelayanan publik. Namun kenyataannya, pertimbangan pemekaran saat ini bukan menjadi pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, akan tetapi lebih pada pertimbangan kepentingan elit nasional dan elit lokal.

Hal ini pula yang menjadi alasan pihak-pihak kontra yang menganggap bahwa usulan pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih banyak didasari kepentingan politik semata. Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota DPRD



Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 1 Januari 2021 ketika dimintai pandangan terhadap isu pemekaran lima kecamatan kepulauan menyatakan bahwa:

Menurut saya, isu pemekaran lima kecamatan kepulauan merupakan kegiatan politik praktis yang sebenarnya hanya dijadikan momen dan kepentingan politik oleh kelompok tertentu. Tidak ada dorongan atau kehendak dari masyarakat lima kecamatan pulau untuk mekar.

Hal ini kemudian diperkuat dari beberapa informasi yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh masyarakat pada tanggal 27 Januari 2021 tentang motif yang menjadi alasan munculnya tuntutan pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar, ia menjelaskan bahwa:

Tuntutan pemekaran ini hanya diinisiasi oleh elit-elit tertentu tanpa adanya pelibatan masyarakat. Dilihat dari perjalanan isu pemekaran ini, kebanyakan pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya pemekaran didasari motif kepentingan politik dan upaya mencari popularitas agar dilirik oleh pejabat-pejabat di pemerintah daerah. Hal ini juga diperkuat dalam beberapa kasus, dimana pihak yang dulunya terlibat aktif dalam upaya pemekaran setelah menduduki posisi strategis tertentu di birokrasi seakan tidak peduli lagi dan tidak memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan pemekaran

### **3.2 Peran elit politik lokal dalam rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dalam banyak kasus pemekaran daerah di Indonesia, ide dan gerakan pemekaran tersebut muncul dari sekelompok elite politik yang memiliki tendensi politik yang melatarbelakangi munculnya ide dan gerakan pemekaran. Begitu juga dengan isu pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang banyak melibatkan peran elit-elit politik lokal baik elit yang memerintah (*governing elit*) maupun elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*). Seperti para politisi yang pernah berkuasa di masa lalu, ataupun sekelompok orang yang menginginkan popularitas dan sumber daya yang ada di daerah kepulauan. Akan tetapi, beberapa pihak menyebutkan bahwa tuntutan pemekaran adalah sah dari aspirasi masyarakat kepulauan, walaupun hasil pengamatan penulis menemukan

bahwa pada hakikatnya para elit politik lokal yang memang menegaskan isu pemekaran ini untuk segera direalisasikan. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan para elit politik untuk merealisasikan pemekaran yaitu pembentukan sebuah organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk mengawal pemekaran, pembentukan sebuah forum untuk percepatan pemekaran dan sebagainya.

### **3.3 Dinamika wacana pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar**

Berbicara tentang dinamika perjalanan isu pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebenarnya ide atau gerakan pemekaran ini telah ada pasca orde baru. Namun, semangat dari para pihak pemekaran tidaklah mengakar sehingga sering muncul inkonsistensi dalam upaya ke arah terealisasinya pemekaran tersebut. Upaya yang dilakukan para pihak pemekaran masih belum serius dan sering terabaikan karena hal-hal yang bersifat pragmatis. Isu pemekaran ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi karena sering dianggap sebagai kegiatan politik praktis oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat kepulauan. Dalam perjalanannya isu pemekaran ini mendapatkan berbagai tantangan dalam pemenuhan syarat terbentuknya sebuah daerah pemekaran yang telah diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah tidak terpenuhinya syarat administratif berupa persetujuan dari Bupati Kepulauan Selayar dan Syarat fisik minimal tujuh kecamatan dalam satu kabupaten pemekaran. Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa isu pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum terealisasi walaupun telah bergulir puluhan tahun sejak pasca orde baru sampai saat ini.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Agar hasil penelitian yang telah penulis paparkan dapat digunakan sebagai hasil temuan, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut dengan berpedoman pada teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, tidak bisa dipungkiri

bahwa elit politik lokal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memperjuangkan pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam upaya pemekaran lima kecamatan kepulauan dipengaruhi oleh sekelompok elite yang memerintah (*governing elite*) seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Namun, berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa upaya pemekaran ini lebih banyak melibatkan elit yang tidak memerintah (*nongoverning elite*) seperti tokoh masyarakat, politisi yang pernah berkuasa di masa lalu dan, kelompok tokoh pemuda yang terhimpun dalam suatu organisasi atau gerakan yang terorganisir.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dapat diketahui bahwa, pergeseran sistem sentralisasi ke desentralisasi melalui pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah yang tercermin dengan adanya tuntutan pemekaran daerah, ternyata telah melahirkan elit-elit politik lokal yang kemudian berusaha berkuasa dan mengeksploitasi daerah dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Fenomena lahirnya elit-elit politik lokal dalam konteks ini sering dikenal dengan peralihan dari *stationary bandits* ke *roving bandits*. Jika pada masa Orde Baru kekuasaan nasional dikuasai oleh seorang bandit besar (*stationary bandits*) yang memiliki peran untuk mengumpulkan kekayaan dan menjaga kekuasaan di skala nasional atau pusat, maka pada era reformasi dengan adanya sistem desentralisasi *stationary bandit* tersebut berevolusi menjadi *roving bandits*. *Roving bandits* merupakan bandit yang mengambil alih posisi dan peranan *stationary bandits* dalam skala dan level yang lebih kecil. Bandit ini sering mengatasnamakan kepentingan masyarakat daerah untuk melegalkan kepentingan pribadinya (Agustino,2017)

Pada hakikatnya, kehadiran desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin melalui tuntutan pemekaran daerah tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada elit-elit politik lokal. Namun, masyarakat juga harusnya memiliki kekuasaan signifikan sehingga tuntutan pemekaran tidak hanya menjadi proyek bagi elit politik lokal semata.

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat terbesar dikarenakan isu pemekaran yang diangkat penulis merupakan permasalahan yang sangat sensitif terutama dikalangan birokrat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga dalam memperoleh data dan informasi sangatlah sulit.

## IV. KESIMPULAN

Berangkat dari permasalahan yang diangkat penulis ada beberapa kesimpulan yang ditemukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya tuntutan pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya adalah a) Kondisi geografis yang sangat; b) Keinginan untuk meningkatkan derajat sosial ekonomi di wilayah kepulauan; c) Perbedaan identitas yang didasarkan pada kategorisasi kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Selayar; d) Motif pemburu rente dari para elit.
2. Isu pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang banyak melibatkan peran elit-elit politik lokal baik elit yang memerintah (*governing elit*) maupun elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*). Seperti para politisi yang pernah berkuasa di masa lalu, ataupun sekelompok orang yang menginginkan popularitas dan sumber daya yang ada di daerah kepulauan.
3. Dalam perjalanannya isu pemekaran ini mendapatkan berbagai tantangan dalam pemenuhan syarat terbentuknya sebuah daerah pemekaran. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah tidak terpenuhinya syarat administratif berupa persetujuan dari Bupati Kepulauan Selayar dan Syarat fisik minimal tujuh kecamatan dalam satu kabupaten pemekaran. Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa isu pemekaran lima kecamatan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum terealisasi walaupun telah bergulir puluhan tahun sejak pasca orde baru sampai saat ini.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di masa pandemi *Covid-19* dengan jumlah angka penyebarannya cukup tinggi dan isu yang diangkat sangat sensitif sehingga proses pengambilan data dan informasi agak sulit.

### **Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*)**

Penelitian ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi lahirnya penelitian-penelitian lanjutan, khususnya pada studi antropologi dan studi pembangunan.

### **V. Ucapan Terima Kasih**

Purna Praja Kab. Kepulauan Selayar dan perangkat Badan Penelitian, Pengembangan, Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab. Kepulauan Selayar atas bantuannya dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya.

### **VI. Daftar Pustaka**

#### **A. Buku-buku/Skripsi/Tesis/Jurnal**

- Abd Halim. 2014. *Politik Lokal: Pola, Actor, & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal, dan Panggung)*. Jakarta: LP2B
- Abu Bakar. 2015. *Disorientasi Politik Dan Peran Intermediary Kelas Menengah To Pulo: Politik Lokal Di Kepulauan Selayar Pasca Orde Baru*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gadjah Mada
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Assidiq, dkk. 2014. *Ironi Pemekaran Wilayah: Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Univeristas Gadjah Mada
- Aprillia, S. 2018. *Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal (skripsi)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UIN Raden Fatah Palembang

- Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Creswell. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damanik, dkk. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Edmonds-Poli, Emily and Eduardo J. Gómez. 2001. "The Politics of Decentralization and Municipal Autonomy in Mexico and India." Paper dipresentasikan pada the Annual Meeting of the American Political Science Association, San Francisco, August 29–September 2.
- Haryanto. 2017. *Elit, Massa dan Kekuasaan: suatu bahasan pengantar*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Hoessein, Bhenyamin. 2003. *Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, makalah untuk seminar "Pembangunan Hukum Nasional VIII" yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM di Denpasar, 14-18 Juli 2003*
- Jeddawi. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media
- Nurcholis. 2016. *Orang Kuat dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasaan Politik Fuad Amin di Bangkalan (skripsi)*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah
- Hutabarat. "Fenomena 'Orang Kuat Lokal' di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi," (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas, 2012), Hlm.17
- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff. 2010. *Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. Malaysian Journal Of History, Politics, & Strategic Studies, Vol. 37 (Jebat: 2010), Hlm.86-104*
- Leo Agustino. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjajaran, Hlm.33
- Leo Agustino. 2009. *Politik dan Perubahan (Antara Reformasi di Indonesia dan Politik Baru di Malaysia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Leo Agustino & Indah Fitriani. 2017. *Korupsi: Akar, Aktor, dan Lokus*. Bandung: Pustaka Pelajar

- McGuire, M. C. and Olson, M. 1996. *The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force*. Journal of Economic Literature 34: 72-96.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Richard Robinso.2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Pratama, Rifki. 2010. *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus: Pembentukan Kota Tangerang Selatan (skripsi)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah
- Praktikno dan Hasrul Hanif. 2008. “*Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran*”, dalam *Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjja Mada
- Yacub & Amin. 2015. *Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Selayar Dalam Sejarah dan Pemikiran*. Makassar: Bambu Press
- Yana, S. Hijri. 2016. *Politik Pemekaran di Indonesia*. Umm Press. Hlm 39

#### **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

#### **C. Lain-lain**

Anonim. Seperti Ini Pandangan Ince Langke Terhadap Deklarasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar, dimuat pada tanggal 30 April 2017, diakses pada tanggal 19 Februari 2021 melalui <https://selayarnews.com/30/04/2017/seperti-pandangan-ince-langke-terhadap-deklarasi-pemekaran-kabupaten-kepulauan-selayar/>

Irfan Wahab. 5 Kecamatan di Selayar Bergabung Minta Pemekaran, dimuat tanggal 6 Juli 2016, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 melalui <https://gosulsel.com/2016/07/06/5-kecamatan-di-selayar-bergabung-minta-pemekaran-kabupaten/>

Munawir, Ingin Pisah dari Kepulauan Selayar, Masyarakat Takabonerate Deklarasi FP2KT, dimuat pada tanggal 24 April 2017, artikel ini diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 melalui [www.sulsatsu.com](http://www.sulsatsu.com)

Yuni arisandy, Pemekaran Daerah Masih Jadi Komoditas Politik, dimuat tanggal 15 November 2013, diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/405243/pemekaran-daerah-masih-jadi-komoditas-politik>

<https://selayarkab.bps.go.id/>